PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

KATA PENGANTAR..... v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Isu-isu Strategis 6

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran 7

1.4 Sistematika Penulisan 11

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024..... 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Program dan Indikator Kinerja 12

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 14

2.3 Perjanjian Kinerja 15

2.4 Instrument Pendukung Capaian Kinerja 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 20

3.2 Efisiensi Anggaran 23

3.3 Inovasi 26

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 27

4.2 Rekomendasi..... 27

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan 7
Tabel 1.2 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang . 7
Tabel 1.3 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan 7
Tabel 1.4 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin 8
Tabel 1.5 : Sarana dan Prasarana 8
Tabel 2.1 : Rencana Kinerja Jangka Menengah (Sebelum Perubahan)..... 14
Tabel 2.2 : Rencana Kinerja Jangka Menengah (Setelah Perubahan)..... 14
Tabel 2.3 : Rencana Kinerja Tahunan 15
Tabel 2.4 : Arah Kebijakan 15
Tabel 2.5 : Perjanjian Kinerja 15
Tabel 2.6 : Program dan Kegiatan 16
Tabel 3.1 : Skala Pengukuran Kinerja 22
Tabel 3.2 : Sasaran Program dan Indikator 21
Tabel 3.3 : Capaian Kinerja Program TW4 2024 21
Tabel 3.4 : Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan 2024 22

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Cascading Biro APBJ 4
Gambar 1.2 : Kerangka Peta Proses Bisnis 5
Gambar 1.3 : Peta Proses Bisnis 5
Gambar 1.4 : Struktur Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa 6
Gambar 2.1 : E-Controlling 16
Gambar 2.2 : E-Planning 17
Gambar 2.3 : SILALAP BAJA 17
Gambar 2.4 : SiRUP Lokal 18
Gambar 2.5 : Blangkon Jateng 19
Gambar 2.6 : SPSE 29

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencanan Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis 2024-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2025

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

YASIP KHASANI, S.IP.,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19741219 199703 1 005

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 75 mengamanatkan dibentuknya lembaga barang jasa yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa. Tindak lanjut dari Perpres ini adalah adanya peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di dalam peraturan tersebut diamanatkan maksimal akhir Desember 2018 harus sudah terbentuk lembaga mandiri berupa Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Provinsi Jawa Tengah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa dengan nomenklatur Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa yang diatur didalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 Agustus 2018.

1.2 Isu-Isu Strategis

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah melaksanakan berbagai tugas dan fungsi guna mewujudkan efektivitas pelayanan pengadaan barang/jasa. Berikut permasalahan utama (*strategic issued*) pada lingkup Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Jateng 1 harga.
2. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang jasa SKPD Pemprov Jateng.

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

1. Susunan Kepegawaian :

   Susunan Kepegawaian Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah yaitu:

   a. Berdasarkan Jabatan :

Tabel 1.1
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFT	JFU	Jumlah
Kepala Biro	1	-	-	-	-	1
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	-	1	3	42	7	53
Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	-	1	-	2	7	10
Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	-	-	1	3	5	9
P3K	-	-	-	9	-	9
Jumlah Total	1	2	4	56	19	82

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan ruang :

Tabel 1.2
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Unit Kerja	Gol IV	Gol III	Gol II	Jumlah
Kepala Biro	1	-	-	1
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	8	43	2	53
Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	1	6	3	10
Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	2	7	-	9
P3K	-	9	-	9
Jumlah Total	12	65	5	82

c. Berdasarkan Pendidikan :

Tabel 1.3
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Unit Kerja	Doktoral / S3	Pasca Sarjana	Sarjana / D-4	Sarjana Muda	SMA/ SMK/ STM	SMP/ ST	Jml
Kepala Biro	-	1	-	-	-	-	1

Unit Kerja	Doktoral / S3	Pasca Sarjana	Sarjana / D-4	Sarjana Muda	SMA/ SMK/ STM	SMP/ ST	Jml
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	1	15	35	-	2	-	53
Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	1	-	5	4	-	-	10
Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	1	3	4	1	-	-	9
P3K	-	-	9	-	-	-	9
Jumlah Total	3	19	53	5	2	-	82

d. Berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel 1.4
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kepala Biro	1	-	1
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	39	14	53
Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	7	3	10
Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	6	3	9
P3K	8	1	9
Jumlah Total	61	21	82

2. Sarana dan Prasarana

Sementara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.Lemari Besi/Metal	5	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
2	Meubelair.Sice	1	Baik
3	Meubelair. Meja 1/2 Biro	5	Baik
4	Meubelair. Kursi Rapat	80	Baik
5	Alat Pendingin Lemari Es	1	Baik
6	Dispenser	7	Baik
7	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
8	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	Baik
9	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	Baik
10	Kursi Rapat Kerja Eselon II	20	Baik
11	Peralatan Personal Komputer	1	Baik
12	Almari Besi Kaca Sorong 2 Pintu	1	Baik
13	Pendingin Ruangan (AC)	33	Baik
14	Almari Besi Kaca Sorong 4 Pintu	1	Baik
15	Almari Besi 2 Pintu	1	Baik
16	Almari Kayu 2 Pintu	1	Baik
17	Filling Cabinet	1	Baik
18	Meja Informasi	1	Baik
19	Meja Computer	1	Baik
20	Kursi Putar Manager	1	Baik
21	Kursi Tunggu isi 3	1	Baik
22	Kursi Tunggu Isi 4	1	Baik
23	Kursi rapat	1	Baik
24	LED TV 32 Inch	2	Baik
25	Printer Laserjet	1	Baik
26	Komputer PC	10	Baik
27	All in one PC	28	Baik
28	Macbook Pro Apple	1	Baik
29	Laptop Acer	1	Baik
30	Laptop Lenovo 9220	2	Baik
31	Laptop HP Spectre X360 13-AP0055TU	6	Baik
32	Printer Brother	1	Baik
33	Proyektor	18	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
34	LED TV 52 Inch	1	Baik
35	Kursi Kerja Eselon III dan IV	10	Baik
36	Kursi Eselon II	1	Baik
37	Printer Epson	1	Baik
38	Personal Komputer Desktop HP	5	Baik
39	Meja Kantor	1	Baik
40	Almari Pakaian	1	Baik
41	Printer DeskJet EPSON L3110	10	Baik
42	Laptop ACER Z3-451/8	3	Baik
43	Kursi Staf	20	Baik
44	Meja Komputer Orbitrend	10	Baik
45	Printer HP Laserjet Pro MFP M28A	6	Baik
46	Printer DeskJet EPSON L6160	1	Baik
47	Mobil Eselon	5	Baik
48	Sepeda Motor	2	Baik
49	Kamera	1	Baik
50	TV LED Samsung Flat Smart TV 65 INCH [UA65RU7100]	2	Baik
51	Portable AUDIO	1	Baik
52	Uninterruptable Power Supply	10	Baik
53	External Hardisk	2	Baik
54	Meja rapat	1	Baik
55	Sofa tamu	7	Baik
56	Kursi tamu	6	Baik
57	Buffet Pendek	2	Baik
58	Penarikan Jaringan Backbone & penataan jaringan internet	1	Baik
59	Laptop Thosiba 2013	9	Baik

3. Anggaran

Anggaran Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam upaya capaian kinerja program tahun 2024 adalah Rp. 2.866.800.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh

enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang terbagi kedalam dua program sebagai berikut:

a. Program "Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa", mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.605.000.000,- (dua milyar enam ratus lima juta rupiah).
b. Program "Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi", mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 261.800.000,- (dua ratus enam puluh satu delapan ratus ribu rupiah).

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya LKjIP yang diawali dengan uraian singkat tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dimuat pula tentang landasan hukum penyusunan LKj dan aspek strategis/isu strategis, keterkaitan dengan Renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan (merupakan penjabaran Visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah dilengkapi dengan rencana kinerja Biro APBJ SETDA Provinsi Jawa Tengah).

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini memuat penjelasan prioritas program dan kegiatan beserta analisis capaian kinerja kantor serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran).

BAB IV. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi.

1.5 Tindaklanjut atas laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024 khusus pada lingkup Biro-Biro SETDA Provinsi Jawa Tengah dikompilasi dalam dokumen LKjIP SETDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2024.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026, adalah sebuah dokumen perencanaan tiga tahun yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan, selama kurun waktu Tahun 2024 - 2026.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen formal dalam sistem pemerintah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan sesuai dengan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Kualitas Rencana Strategis (Renstra) sangat ditentukan oleh kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam memahami permasalahan dan tugas pokok dan fungsi serta dipengaruhi pula oleh kemampuan menerjemahkan sasaran dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis (Renstra).

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai tiga tahun mendatang yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. Adapun tujuan yang akan dicapai Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa yaitu **Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah**.

b. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran mendasarkan pada tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani. Rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut, terdapat 1 (satu)

sasaran untuk mewujudkan tujuan yaitu **Meningkatnya Sinergi Kebijakan Yang Adaptif Dan Berorientasi Hasil**.

2. Program dan Indikator Kinerja

Program merupakan hasil yang diharapkan dari suatu sasaran yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran mendasarkan pada tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani. Rumusan program yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi.

Berdasarkan makna penetapan program tersebut, terdapat 2 (dua) program untuk mewujudkan sasaran yaitu:

a. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan indikator kinerja yaitu:
   1) Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa;
   2) Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik;
   3) Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja yaitu: Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa.

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Jangka Menengah

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
			2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	90	91	92
		Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	80	82	85
		Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	81	82	83
2	Program Penunjang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan	100	100	100

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
			2024	2025	2026
	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa			

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Kinerja Tahun 2024 Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah dengan 2 (dua) program dan 4 (empat) indikator kinerja yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	90
		Tingkat Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%	80
		Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	%	81
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	%	100

Tabel 2.3 Arah Kebijakan

No	Program	Strategi	Arah Kebijakan
1	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatkan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	Peningkatan kualitas pengelolaan strategi, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa
		Meningkatkan Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
		Meningkatkan kualitas pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa	Peningkatan kualitas pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan serta pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis

No	Program	Strategi	Arah Kebijakan
		(UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	pengadaan barang dan jasa
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian, dan keuangan	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, tahun 2024 Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menyelesaikan kontrak kinerja sebagaimana tercantum pada dokumen penetapan kinerja di bawah ini:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)
1	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	90
		Tingkat Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%	80
		Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	%	81
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	%	100

Adapun program serta indikator kinerja diatas, diwujudkan dalam bentuk operasional melalui program dan kegiatan sebagai berikut yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	90%	2.605.000.000
		Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	80%	
		Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa,	81%	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa		
2	Program Administrasi Umum	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	100%	261.800.000

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan didukung beberapa aplikasi pendukung yaitu:

1. E-Controlling

   Fungsi: Mengontrol realisasi dari perencanaan anggaran, pendapatan daerah dan mencatat laporan pergerakan realisasi anggaran.

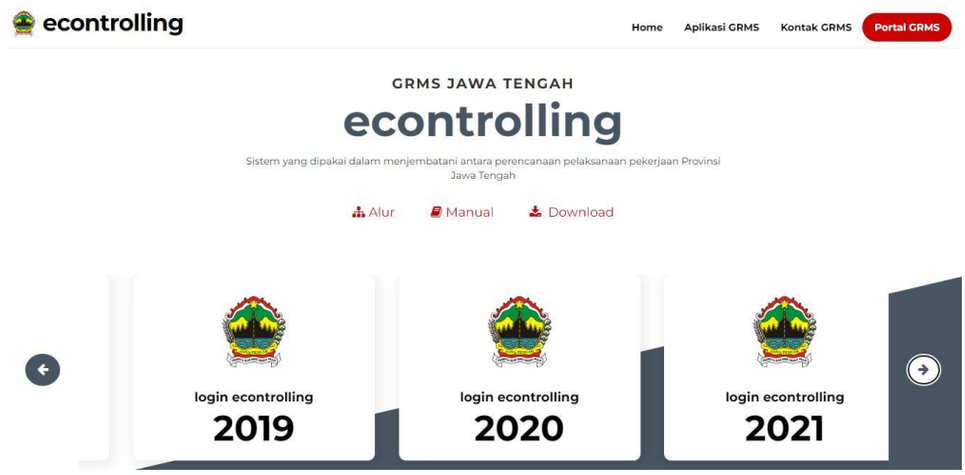

Gambar 2.1 E-Controling

(https://econtrolling.jatengprov.go.id/)

2. E-Planning

   Fungsi: Menyusun RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, dan tepat.

Gambar 2.2 E-Planning

(https://eplanning.jatengprov.go.id/)

3. SILALAP BAJA.

   Fungsi:

   a. Modernisasi proses layanan administrasi pengadaan barang/jasa.
   b. Proses review dokumen tender SKPD.
   c. Pendaftaran akun SPSE penyedia baru.

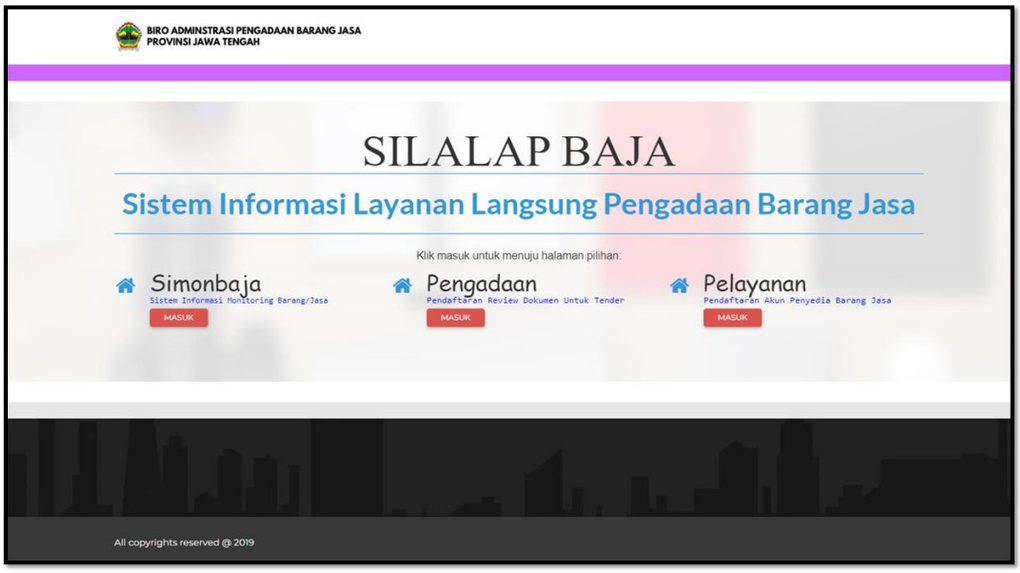

Gambar 2.3 SILALAP BAJA
(https://silalapbaja.biroapbj.jatengprov.go.id/)

4. SiRUP Lokal

   Fungsi:

   a. Mengakomodasi proses pemaketan pengadaan barang/jasa ke dalam SiRUP LKPP.
   b. Wujud transparansi perencanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
   c. Memastikan metode pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peratuan yang berlaku.

Gambar 2.4 SiRUP Lokal
(https://sirup.biroapbj.jatengprov.go.id/)

5. SPSE

   Fungsi:

   a. Wujud Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
   b. Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, baik yang dilakukan menggunakan Metode Tender dan Non-Tender.
   c. Pencatatan Pengadaan Non-Tender dan Swakelola.

Gambar 2.7 SPSE
(https://lpse.jatengprov.go.id/eproc4)

6. Blangkon Jateng

   Fungsi:

   a. Mendorong UMK Go Digital, menjadikan pengadaan lebih inklusif, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.
   b. Report progres transaksi Pemerintah Daerah, data penyedia dan data produk.

Gambar 2.6 Blangkon Jateng
(https://blangkonjateng.jatengprov.go.id/)

7. Sistem Informasi Monitoring Barang Jasa (SIMONBAJA)

   Fungsi:

   a. Monitoring target dan realisasi proses pengadaan barang/jasa.
   b. Mengintegrasikan data perencanaan pengadaan barang/jasa dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), data pemilihan penyedia barang/jasa dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), serta data e-Purchasing dengan aplikasi E-Katalog dan Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah (Blangkon Jateng).
   c. Menampilkan data realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan alokasi paket pekerjaan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) yang diperoleh dari hasil input ekontrak di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Gambar 2.7 SIMONBAJA
(https://simonbaja.jatengprov.go.id/)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 adalah bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik dengan perhitungan:

$$Capaian = \frac{realisasi}{target} \; x \; 100\%$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 91 %	Sangat Baik
2	76 % sampai dengan 90,99 %	Baik
3	66 % sampai dengan 75,99 %	Cukup
4	51 % sampai dengan 65,99 %	Kurang
5	Kurang dari 50,99 %	Sangat Kurang

Sebagai sebuah media pengukuran, skala ini digunakan untuk mengklasifikasi hasil pengukuran indikator kinerja. Meskipun hasil klasifikasi tersebut pada akhirnya menggambarkan keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran, namun pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, tapi sebagai informasi awal yang sangat menentukan bagi pengambil keputusan untuk membuat langkah-langkah yang solutif dan stratejik

Pada Tahun 2024, secara umum Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dalam upaya pencapaian kinerja Indikator Kinerja Program yang diampu. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, terdapat 2 (dua) Program strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang harus diwujudkan yaitu:

Tabel 3.2 Program Strategis dan Indikator

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPD
				Target	Realisasi	Persentase	
1	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	90	94,78	105,31	92
		Tingkat Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%	80	88,67	110,84	85
		Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	%	81	81,25	100,31	83
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	100	100,00	100

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Program Strategis Tahun 2024

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%	Kategori	Sumber Data
1	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	90	94,78	105,31	Sangat Baik	Biro APBJ
		Tingkat Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	80	88,67	110,84	Sangat Baik	
		Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	81	81,25	100,31	Sangat Baik	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	100	100	100,00	Sangat Baik	

Capaian kinerja pada Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 mencapai lebih dari 100% dengan kategori sangat baik.

1. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Target	Target	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%
1	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	90	90	90	90	92,53	102,81	-	-	-

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022-2024

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
				Target	Target	Target	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%
1	Meningkatnya Sinergi Kebijakan Yang Adaptif Dan Berorientasi Hasil	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-	-	-	90	94,78	105,31

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
				Target	Target	Target	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%
			Tingkat Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	-	-	-	-	-	-	80	88,67	110,84
			Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	-	-	-	-	-	-	81	81,25	100,31

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa mengalami perubahan dari Renstra SETDA 2018-2023 menuju Renstra SETDA 2024-2026, yang semula sasaran "Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" menjadi "Meningkatnya Sinergi Kebijakan Yang Adaptif Dan Berorientasi Hasil" sehingga Indikator Kinerja juga mengalami perubahan. Tahun 2024 Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah, tingkat capaian realisasi kinerja mencapai lebih dari 100% dikarenakan beberapa komponen formulasi mengalami realisasi melebihi target, sehingga hasil akhirnya melebihi target.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis TW IV Tahun 2023
Capaian Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

URAIAN	TARGET TAHUN 2024	SAT	REALISASI							
			TRIWULAN 1		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			T	R	T	R	T	R	T	R
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah										
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah										
Nilai IKM Biro Pengadaan Barang dan Jasa	**80**	**Angka**	**80**	**91**	**82**	**86.75**	**82**	**87**	**82**	**86.75**

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Triwulan IV mencapai realisasi 87% dari target 82% hal ini dapat diartikan bahwa Kepuasan masyarakat yang dinilai dari beberapa indikator layanan yang diberikan Biro APBJ kepada pengguna layanan mendapatkan kategori Sangat Baik.

3.2 Efisiensi Anggaran

Pencapaian sasaran strategis suatu organisasi tidak lepas dari pemanfaatan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Oleh karena itu sistem perencanan dan penganggaran merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dalam pembangunan. Hal ini karena dalam menjalankan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis tentu saja memerlukan anggaran meskipun tidak selalu. Oleh karena itu perlu dievaluasi penggunaan anggaran apakah sudah efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Jumlah anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.866.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.852.843.901,- atau sebesar (99,51%), adapun Efisiensi Anggaran sebesar Rp. 13.596.099,- atau (0,49%), hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada kode rekening perjalanan dinas di bebrapa sub kegiatan, akan tetapi terhadap seluruh kegiatan tersebut, capaian fisiknya terlaksana 100%.

Tabel 3.6 Penyerapan Anggaran Program/KegiatanTahun 2024

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)
							BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI		
								Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	**2.866.800.000**	**100**	**100**	**0**	**100**	**629.755.436**	**2.852.843.901**	**99,51**	**-0,49**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**261.800.000**	**100**	**100**	**0**	**100**	**12.532.000**	**261.108.700**	**99,74**	**-0,26**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	261.800.000	100	100	0	100	12.532.000	261.108.700	99,74	-0,26
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	236.800.000	100	100	0	100	12.532.000	236.177.700	99,74	-0,26
2	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	25.000.000	100	100	0	100	0	24.931.000	99,72	-0,28
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	**2.605.000.000**	**100**	**100**	**0**	**100**	**617.223.436**	**2.591.735.201**	**99,49**	**-0,51**
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.455.000.000	100	100	0	100	377.641.427	1.447.855.314	99,51	-0,49
1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa **	400.000.000	100	100	0	100	166.431.750	395.820.600	98,96	-1,04
2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa **	833.000.000	100	100	0	100	168.219.421	831.424.589	99,81	-0,19
3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **	222.000.000	100	100	0	100	42.990.256	220.610.125	99,37	-0,63
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	644.000.000	100	100	0	100	159.473.660	643.525.793	99,93	-0,07
1	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik **	203.000.000	100	100	0	100	41.455.500	202.870.339	99,94	-0,06
2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	315.000.000	100	100	0	100	99.937.160	314.692.954	99,9	-0,1
3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	126.000.000	100	100	0	100	18.081.000	125.962.500	99,97	-0,03
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	506.000.000	100	100	0	100	80.108.349	500.354.094	98,88	-1,12
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **	157.000.000	100	100	0	100	33.237.700	155.050.813	98,76	-1,24
2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **	173.000.000	100	100	0	100	20.135.149	169.987.832	98,26	-1,74
3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	176.000.000	100	100	0	100	26.735.500	175.315.449	99,61	-0,39

3.3 INOVASI

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka mendukung terwujudnya reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi yang termasuk dalam 10 Program Unggulan Gubernur Jawa Tengah, menggunakan Sistem Informasi Monitoring Barang Jasa (SIMONBAJA) yang merupakan platform digital bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam monitoring target dan realisasi proses pengadaan barang/jasa. Sistem Informasi Monitoring Barang Jasa (SIMONBAJA) mengintegrasikan data perencanaan pengadaan barang/jasa dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), data pemilihan penyedia barang/jasa dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), serta data e-Purchasing dengan aplikasi E-Katalog dan Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah (Blangkon Jateng). Selain itu Sistem Informasi Monitoring Barang Jasa (SIMONBAJA) menampilkan data realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan alokasi paket pekerjaan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) yang diperoleh dari hasil input ekontrak di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Gambar 3.1 SIMONBAJA
(https://monev.biroapbj.jatengprov.go.id/)

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa secara umum Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas program strategisnya. Hasil analisis pencapaian pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) Program Strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja dengan kategori "Sangat Baik".